Kinerja Pembinaan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam Penanganan Prostitusi (Studi Kasus: Prostitusi di Jalan Danau Tempe)

Satria Putra Pratama Hadinegara Watruty[1)], Putu Nomy Yasintha[2)], Komang Adi Sastra Wijaya[3)]
[123)]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
E-Mail: Satriaipa4@gmail.com[1)],Nomyyasintha.unud@gmail.com[2)],Adi.ganainn@gmail.com[3)]

ABSTRACT

Prostitution is a social problem that tends to occur in urban areas of a country, including in Indonesia. In Denpasar, in dealing with the problem of prostitution, a government institution, namely the Social Service Office of the City of Denpasar, was given the responsibility of fostering female prostitutes again as functional citizens. The purpose of this study is determining the performance of the Denpasar City Social Service in dealing with the problem of prostitution. The research method used is Qualitative Descriptive method with the method of determining the informant is Purposive Sampling and the method of observation is Passive Observation. It was found that the performance of the Denpasar City Social Service prostitution was still not effective due to various factors from WTS, community participation and the interests of third parties. Therefore it is recommended to educate the younger generation about the dangers of HIV/AIDS or legalize prostitution

Keywords*: Performance, Prostitution, Denpasar City Social Service*

1. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bali adalah sebuah provinsi yang sudah sangat dikenal dengan keunikan pariwisatanya, baik dalam seni ataupun tradisi, di domestik maupun manca negara. Bali juga adalah penyumbang devisa sektor pariwisata terbesar di Indonesia yaitu sebesar 40 % (Arief Yahya, 2017). Dengan jumlah penduduk lebih dari 4.2 juta dan dengan laju pertumbuhan sebesar 2.14% pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018) dan 69.36% bekerja di sektor pariwisata memberikan Bali sebuah rintangan dalam perkembangan, maupun dalam hal lingkungan, ekonomi atau sosial.

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali dan sentra kehidupan di Bali itu sendiri, memiliki pertumbuhan penduduk yang jauh lebih tinggi ketimbang provinsi Bali, yakni sebesar 4.01% dan dengan jumlah penduduk lebih dari tujuh ratus delapan puluh ribu, dan dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar

Kota Denpasar memiliki tantangan yang jauh lebih berat ketimbang kabupaten-kabupaten lain dalam masalah kependudukan sebagai kota yang memiliki populasi dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar ketimbang kabupaten lain. Masalah-masalah tersebut dapat berupa kesenjangan sosial, kebersihan lingkungan dan penyakit-penyakit sosial masyarakat yang selalu ada di kota-kota besar seperti Denpasar. Penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat itu dapat berupa

kejahatan-kejahatan berat seperti tindakan kriminal; pembunuhan, perampokan dan penculikan maupun kejahatan-kejahatan lain seperti, narkoba, perjudian ataupun prostitusi (MateriIPS.com, 2017).Dari penyakit-penyakit sosial tersebut yang sangat sulit untuk di berantas adalah prostitusi.

Salah satu penyakit sosial pada masyarakat yang berdampak pada tatanan budaya masyarakat adalah prostitusi. Prostitusi merupakan suatu tindakan dimana dua orang individu, umumnya laki-laki dan perempuan, melakukan hubungan seksual dengan balas jasa berupa uang. Di Indonesia prostitusi masih belum mempunyai dasar hukum yang menyeluruh dan jelas. Dalam KUHP Konstitusi Prostitusi diatur oleh dua pasal yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menjelaskan bahwa "siapa pun yang dengan sengaja memfasilitasi tindakan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya mata pencaharian, diancam dengan hukuman penjara paling banyak satu tahun dan empat bulan atau maksimum denda lima belas ribu rupiah.

Lalu pasal 506 menjelaskan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Di Bali kegiatan transaksional prostitusi pada umumnya berkonsentrasi di klub-klub malam. Bahkan, tidak sedikit dari praktik ini menyamar menjadi usaha lain, seperti spa atau salon. Kegiatan prostitusi ini tersebar di seluruh kabupaten di Bali dan Pemerintah Provinsi Bali merespon keberadaan praktek prostitusi dengan membentuk Peraturan Daerah tentang pemberantasan praktek prostitusi Kota Denpasar sendiri memiliki Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 dalam pasal 39 yang menyatakan pelarangan perbuatan prostitusi, tindakan asusula dan penyediaan tempat asusila. Meskipun sudah ada perda yang melarang kegiatan prositusi namun kegiatan prostitusi masih dapat ditemukan di Kota Denpasar.

Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum mengatur pemberantasan prostitusi, tetapi prostitusi sebagai upaya sangat sulit untuk diberantas karena masalah pelacuran merupakan masalah yang perlu ditangani oleh berbagai institusi, terutama oleh Dinas Sosial dalam hal membina dan kembali ketika ada pilihan Satpol PP. Dinas Sosial Kota Denpasar adalah lembaga pemerintah yang berperan dalam menangani masalah sosial di masyarakat. Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki area yang menangani masalah sosial dalam berbagai aspek; bidang-bidang ini mencakup bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi tuna sosial, bidang sponsor anak, dari bidang-bidang ini bidang rehabilitasi sosial yang tugasnya menangani pelacuran di wilayah Kota Denpasar. Tugas rehabilitasi sosial adalah memberikan panduan dan pemberdayaan bagi Perempuan Tuna Sosial (WTS) dengan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Dinas Sosial akan menerima anggaran pelatihan setiap tahun jika polisi kota telah menggiring

WTS, maka WTS diberikan kelas keterampilan yang dibina dan diberikan, tetapi sayangnya tidak ada respon yang baik dari WTS sehingga ketika mereka selesai dibina dan dikirim pulang, germo mereka mengikuti mereka dan menjemput mereka lagi.

Lokasi-lokasi prostitusi di Denpasar tersebar di berbagai daerah di Denpasar seperti di Jalan Gatot Subroto, Jalan Danau Tempe dan Jalan Danau Tempe Denpasar. Pekerja seks komersial sering berkeliaran di daerah ini dengan harga terjangkau. Sebuah survei dari Yayasan Kertipraja, yang berperan dalam konseling PSK, mengkalkulasikan bahwa mereka seringkali bersedia dibayar sekitar Rp. 30 ribu hingga Rp. 50.000. Yayasan juga mencatat bahwa kegiatan pelacuran sebagian besar terjadi di lokasi lain di Sanur, yaitu, Jalan Danau Poso dan Danau Tempe.Salah satu tempat prostitusi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat di Denpasar adalah wilayah Jalan Danau Tempe dimana para lelaki hidung belang biasa mencari jajanan PSK di pinggir jalan maupun di kafe remang remang yang ada di daerah jalan tersebut mereka beroperasi di bilik-bilik gelap disekitaran Sanur, tempat itu sangat dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga tempat itu merupakan lokasi prostitusi yang tepat untuk diteliti. Berdasarkan interview singkat yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala bidang rehabilitasi sosial, kebanyakan pekerja seksual yang ada di Bali merupakan perempuan-perempuan yang berasal dari Jawad an pada tahun 2017 Dinas Sosial sudah memulangkan 20 orang kembali ke kampungnya

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa prostitusi masih menjadi momok bagi masyarakat Bali hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam Penanganan Prostitusi di Kota Denpasar (Studi Kasus: Kegiatan Prostitusi di Jalan Danau Tempe)"

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kinerja Dinas Soial dalam menangani prostitusi di Jalan Danau Tempe?

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penanganan prostitusi di Jalan Danau Tempe?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

a. Menjelaskan bagaimana kinerja Dinas Soial dalam menangani prostitusi di Jalan Danau Tempe

b. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan prostitusi di Jalan Danau Tempe tersebut

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Manfaat teoritis, yakni:

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut kinerja Layanan Sosial Denpasar. Ini juga menjadi input bagi pengetahuan ilmiah di bidang pendidikan dan ilmu sosial di Indonesia.

b. Manfaat praktis, yakni:

1. Dinas Sosial, diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih efektif dalam menangani masalah prostitusi dan menemukan celah-celah dalam kinerja mereka sebelumnya

2. Bagi masyarakat sekitar Jalan Danau Tempe, diharapkan penelitian ini bisa mengurangi aktifitas prostitusi yang distruptif di lingkungan Desa Sidakarya

2. KAJIAN PUSTAKA

ORGANISASI.

Organisasi adalah sebuah sistem, memiliki struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, di mana orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Beach, 1980; Champoux, 2003). Organisasi terdiri dari unsur-unsur yang saling tergantung dan ada sub-sistem di dalamnya. Dalam organisasi ada tingkat formalitas dan pembagian tugas atau peran yang harus dimainkan oleh anggota kelompok.Istilah organisasi juga dapat diartikan sebagai asosiasi atau asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki komitmen bersama dan ikatan formal untuk mencapai tujuan organisasi, dan di dalam asosiasi tersebut terdapat hubungan antara anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau disubordinasikan (Beach dan Reinhartz, 2004; Bush dan Middlewood, 2005).

Dua definisi di atas menunjukkan betapa pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam melaksanakan semua kebijakan / keputusan yang dibuat di tingkat administrasi atau manajerial. Dalam hubungan ini, esensi suatu organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai tempat di mana kegiatan administrasi dan manajemen dilakukan. Kedua, sebagai proses yang berupaya menyoroti interaksi (hubungan) antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi.

KINERJA

Istilah kinerja dapat berarti suatu evaluasi terhadap proses suatu kegiatan untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok ataupun organisasi. Dalam arti ini kinerja merupakan suatu instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat prestasi atau kebijakan kelompok maupun individu.Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai kinerja:

Keban (2004) berpendapat bahwa kinerja adalah terjemahan kinerja yang sering diartikan sebagai "penampilan", "demonstrasi" atau "prestasi". Mangkunegara (2008: 67) juga meyakini bahwa istilah kinerja berasal dari kata

job performance atau kinerja aktual, yaitu prestasi kerja atau prestasi yang ingin dicapai.

INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja adalah talak ukur suatu pencapaian secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran/tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dengan memperhitungkan indikator-indikator berikut :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah hasil yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.

3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.

4. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Proses penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan penelitian deskriptif yang menguraikan kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menangani pelacuran. Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Denpasar dan Jalan Danau Tempe. Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode penentuan informan purposive sampling dan dapat berubah menjadi snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi studi literatur dan data online. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi penarikan dan kesimpulan serta teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PROSTITUSI

Untuk menilai kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dapat dilakukan dengan berbagai aspek. Dalam konteks penelitian ini, menilai kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi public memerlukan aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur kinerja organisasi tersebut adalah melalui indikator-indikator antara lain adalah:

1. *Input* (Masukan)

2. *Process* (Proses)

3. *Output* (Hasil yang diharapkan)

4. *Outcome* (Hasil akhir dari kegiatan organisasi tersebut)

5. *Impact* (Dampak dari kinerja pada lingkungan sekitar)

Dari aspek-aspek diatas yang telah dijabarkan, akan dibahas secara detil mengenai pencapaian dari indicator diatas yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Denpasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian indikator yang tertulis berikut ini

INPUT

Input adalah aspek yang dibutuhkan oleh organisasi agar mampu mencapai tujuan akhir dari kegiatan.

Temuan peneliti dalam penanganan prostitusi oleh indikator ini belum terpenuhi karena karena berdasarkan pengakuan dari sekretaris TRC, mereka tidak mendapat dana yang cukup untuk operasional penertiban WTS. Sedangkan untuk sumber daya manusia berdasarkan surat tugas mereka mendapatkan tenaga kontrak sebanyak lima orang, jumlah yang kurang cukup berhubung dengan skala dari tugas yang TRC Dinas Sosial Kota Denpasar kerjakan. Untuk informasi dari keberadaan wisma WTS mereka mengandalkan dari razia-razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Observasi dari peneliti juga berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas menyimpulkan bahwa untuk masalah prostitusi ini Kepala Dinas cenderung tidak mempunyai masukan dan kontribusi terhadap penanganan prostitusi meskipun dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar Nomor 460/91/DISSOS/2019, kepala dinas berperan sebagai penasehat.

Hendaknya untuk di waktu yang mendatang, Dinas Sosial Kota Denpasar harus mampu lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerjanya

PROCESS

Process adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Atau dalam kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Dengan input yang sudah didapat diharapkan dalam proses ini didapatkan hasil yang diharapkan

Dalam konteks ini, proses mempunyai arti kemampuan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam pelaksanaan pembinaan kepada WTS, menyikapi permasalahan yang terjadi dalam penanganan WTS, adanya keluhan, serta pelaksanaan kinerjanya dalam memberikan pembinaan sudah sesuai dengan standard operasional. Namun proses kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar, dalam pelaksanaan kinerja tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah ditetapkan yaitu pelarangan Prostitusi karena yang mereka tekankan pada pembinaan adalah bahaya dari HIV/AIDS. Dalam pembentukan pelayanan Dinas Sosial Kota Denpasar juga mengajak masyarakat terutama dalam menanamkan kesadaran terhadap bahaya dari HIV/AIDS terutama pada tokoh-tokoh masyarakat.

OUTPUT

Output adalah hasil yang diharapkan dari proses yang sudah dijalankan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini terdapat tujuan yang kontra antara yang tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 sebagai acuan untuk ketertiban umum dalam kota Denpasar.

Pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 BAB V berisi tentang tata tertib sosial dan perlindungan disabilitas bagian kesatu pasal 39 tertera bahwa setiap orang dilarang:

a. Melakukan kegiatan prostitusi

b. Menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi

c. Memfasilitasi , membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi dan

d. Memakai jasa prostitusi Dan juga melakukan tindakan asusila di tempat umum dan mengusahakan wisma asusila.

Namun pada kenyataannya tujuan akhir dari pembinaan WTS tidaklah sama dengan Perda diatas berdasarkan pengakuan dari kepala dinas dan sekretaris dari TRC fokus dari pembinaan untuk saat ini adalah untuk meredam penyebaran HIV/AIDS. Itulah *output* yang diharapkan dari pembinaan WTS. Ada faktor yang mempengaruhi perubahan dari tujuan akhir ini yang akan dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar

OUTCOME

Outcome adalah hasil nyata dari kinerja yang telah dijalankan oleh organisasi tersebut apakah sesuai dengan tujuan akhir yang ditetapkan. Jika dilihat dari segi formal yaitu mengacu pada perda, *outcome* dari kinerja jauh dari tujuan yang ditetapkan. Ini bisa dilihat dari jumlah WTS yang semakin bertambah setiap tahun dan menyebar tidak hanya di Danau Tempe tetapi ke dusun lain juga berdasarkan pengakuan dari pak Gung Aji Murjana selaku Kepala Seksi di Desa Sanur Kauh. Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mempunyai efek yang berarti bagi WTS yang diberikan pembinaan, mereka cenderung tidak mempunyai respon yang baik terhadap pembinaan yang sudah dilakukan terhadap mereka. Alasan lain dari hasil yang jauh dari target adalah banyaknya WTS yang lebih memilih untuk menjalani pekerjaan prostitusi dengan alasan bahwa pekerjaan ini lebih mudah dan menghasilkan penghasilan yang relative lebih banyak ketimbang dengan pekerjaan yang dianjurkan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar melalui kelas-kelas keterampilan seperti memasak, menjahit dll.

Sedangkan dari segi informal, tujuan yang mereka tetapkan sendiri, yaitu penekanan penyebaran HIV/AIDS, juga tidak terpenuhi. berdasarkan salah satu hasil tes kesehatan setiap dua minggu oleh Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan Perbekel Desa Sanur Kauh yang menemukan dari dua puluh lima WTS yang di tes kesehatannya oleh Dinas Kesehatan; dua

puluh empat WTS menderita HIV/AIDS sedangkan satu WTS menderita *Siphyllis.*

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar masih belum mencapai tujuan yang sudah ditentukan

IMPACT

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan temuan peneliti, dampak dari hasil kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mempunyai efek yang nyata secara jangka panjang. Dibuktikan dari salah satu WTS yang menjadi informan bagi peneliti. WTS tersebut menyatakan bahwa yang bermanfaat dari kunjungan-kunjungan dari aparat pemerintah untuk para WTS hanyalah pemeriksaan kesehatan gratis dan jika pun mereka dipulangkan ke daerah asal, mereka akan tetap kembali. Mayoritas dari WTS pun tidak terlalu merespon baik dan cenderung acuh terhadap pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar.

Sedangkan masyarakat sekitar tidak merasakan dampak yang berarti dari kinerja dinas sosial. Sebaliknya masyarakat sekitar bergantung pada keberadaan prostitusi di daerah jalan danau tempe berdasarkan pengakuan narasumber yang berprofesi sebagai seorang kreditor di daerah tersebut dan juga pedagangpedagang yang berjualan di daerah Jalan Danau Tempe

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI PROSTITUSI

Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam Penanganan Prostitusi belum sepenuhnya optimal. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar. Faktor-faktor tersebut meliputi partisipasi masyarakat, WTS dan kepentingan-kepentingan oknum dalam pemerintah.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Dinas Sosial Kota Denpasar merupakan institusi pemerintah yang melayani masyarakat dalam hal masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat. Jadi, diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak akan terlaksana dengan baik. Hali itu akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Pastisipasi masyarakat di Jalan Danau Tempe terhadap masalah prostitusi di Jalan Danau Tempe sangatlah kurang, sebaliknya masyarakat

disekitar sana cenderung melindungi aktivitas prostitusi. Itu berdasarkan dari pengakuan berbagai pedagang, seorang kreditor germo/mucikari dan pak Gung Aji Murjana,selaku apparat pemerintah yang turun untuk membina, yang ditanyai soal keberadaan prostitusi di daerah Jalan Danau Tempe tersebut. Mereka menyatakan bahwa banyak pedagang

mendapatkan penghasilan kebanyakan dari pendatang yang mencari prostitusi di jalan tersebut, jika prostitusi itu di basmi dari Jalan Danau Tempe maka mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Prostitusi saja sangat dilindungi, apalagi mengharapkan partisipasi masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab kendala Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menangani prostitusi. Masyarakat di sekitar daerah tersebut enggan untuk menghilangkan praktek prostitusi tersebut.

(WANITA TUNA SUSILA)

Target dari pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial adalah tobatnya para WTS atau Wanita Tuna Susila dari praktek prostitusi. Maka untuk mencapai target, selain diperlukannya kinerja yang baik dari Dinas Sosial Kota Denpasar itu sendiri, perlu juga respon yang baik dari WTS agar target dari kinerja dapat tercapai. Karena pembinaan perlu kesadaran dari pihak yang terbina. Dari temuan di lapangan, para WTS cenderung tidak mempunyai respon yang baik terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, baik itu pembinaan mental, maupun pembinaan keterampilan. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan prostitusi merupakan pekerjaan yang relatif lebih mudah dan lebih berpenghasilan dibanding jenis pekerjaan lain yang tersedia untuk mereka. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan dari semua narasumber yang dimintai keterangan mengenai respon WTS terhadap pembinaan tersebut. Selain itu mayoritas dari WTS merupakan perempuan yang tidak terdidik sehingga pilihan pekerjaan untuk WTS sangatlah terbatas. Seperti yang disebutkan sebelumnya pendidikan terbatas menyebabkan mereka memilih pekerjaan prostitusi yang mudah dan pendidikan terbatas menyebabkan mereka tidak responsif terhadap pembinaan yang diberikan.

Kurangnya respon yang baik dari WTS menyebabkan Dinas Sosial Kota Denpasar kesulitan untuk membina para WTS. Seperti yang penulis sebutkan tadi, selain kinerja yang baik dari Dinas Sosial Kota Denpasar, diperlukan respon yang baik juga dari para WTS, jika WTS tidak mempunyai respon yang baik target dari kinerja tidak akan tercapai, target penghilangan prostitusi maupun penekanan penyebaran HIV/AIDS.

KEPENTINGAN OKNUM TERTENTU DALAM PEMERINTAH

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak di luar dari Dinas Sosial Kota Denpasar. Selain dari masyarakat sekitar, ada pula kepentingan dari berbagai oknum di dalam pemerintah yang juga melindungi praktek prostitusi di Jalan Danau Tempe.

Menurut pengakuan dari salah satu germo yang beroperasi di Jalan Danau Tempe, mereka membayar sejumlah uang kepada oknum-oknum dari instansi pemerintah tertentu untuk mendapatkan, istilahnya, '*Backing'* dari oknum tersebut. Dengan membayar kepada oknum-oknum tersebut, oknum tersebut akan menutup mata terhadap praktek prostitusi tersebut dan jika ada razia tibatiba dari pemerintah pusat maka oknum-oknum tersebut akan memperingatkan germo/mucikari tentang razia yang akan datang. Perlu dicatat bahwa mayoritas dari oknum-oknum ini adalah orang-orang yang berjabatan tinggi di dalam instansinya, sehingga dengan *backing* yang dimiliki oleh pelaku aktivitas prostitusi, tindakan yang lebih lanjut untuk menangani prostitusi akan lebih sulit untuk dilakukan.

5.KESIMPULAN

Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diproses pada bab sebelumnya tentang kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam penanganan prostitusi. Secara umum kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dinilai masih kurang efektif. Hal ini berkaitan dengan bagaimana membina prostitusi, agar WTS dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang fungsional. Dari hasil analisa dan interpretasi data di lapangan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Temuan peneliti dalam penanganan prostitusi oleh indikator ini belum terpenuhi karena karena berdasarkan pengakuan dari sekretaris TRC, mereka tidak mendapat dana yang cukup untuk operasional penertiban WTS. Sedangkan untuk sumber daya manusia berdasarkan surat tugas mereka mendapatkan tenaga kontrak sebanyak lima orang, jumlah yang kurang cukup berhubung dengan skala dari tugas yang Dinas Sosial Kota Denpasar kerjakan. Untuk informasi dari keberadaan wisma WTS mereka mengandalkan dari razia-razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Observasi dari peneliti juga berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas menyimpulkan bahwa untuk masalah prostitusi ini Kepala Dinas cenderung tidak mempunyai masukan dan kontribusi terhadap penanganan prostitusi meskipun dalam KeputusanKepala Dinas Sosial Kota Denpasar Nomor 460/91/DISSOS/2019, kepala dinas berperan sebagai penasehat.

2. pada kenyataannya tujuan akhir dari pembinaan WTS tidaklah sama dengan Perda diatas berdasarkan pengakuan dari kepala dinas dan sekretaris dari TRC fokus dari pembinaan untuk saat ini adalah untuk meredam penyebaran HIV/AIDS. Itulah *output* yang diharapkan dari pembinaan WTS. Ada faktor yang mempengaruhi perubahan dari tujuan akhir ini yang akan dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar

3. Jika dilihat dari segi formal yaitu mengacu pada perda, *outcome* dari kinerja

jauh dari tujuan yang ditetapkan. Ini bisa dilihat dari jumlah WTS yang semakin bertambah setiap tahun dan menyebar tidak hanya di Danau Tempe tetapi ke dusun lain juga berdasarkan pengakuan dari pak Gung Aji Murdana selaku Kepala Seksi di Desa Sanur Kauh. Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mempunyai efek yang berarti bagi WTS yang diberikan pembinaan, mereka cenderung tidak mempunyai respon yang baik terhadap pembinaan yang sudah dilakukan terhadap mereka. Sedangkan dari segi informal, tujuan yang mereka tetapkan sendiri, yaitu penekanan penyebaran HIV/AIDS, juga tidak terpenuhi. berdasarkan salah satu hasil tes kesehatan setiap dua minggu oleh Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan Perbekel Desa Sanur Kauh yang menemukan dari dua puluh lima WTS yang di tes kesehatannya oleh Dinas Kesehatan; dua puluh empat WTS menderita HIV/AIDS sedangkan satu WTS menderita *Siphyllis*

4. dampak dari hasil kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mempunyai efek yang nyata secara jangka panjang. Dibuktikan dari salah satu WTS yang menjadi informan bagi peneliti. WTS tersebut menyatakan bahwa yang bermanfaat dari kunjungan-kunjungan dari aparat pemerintah untuk para WTS hanyalah pemeriksaan kesehatan gratis dan jika pun mereka dipulangkan ke daerah asal, mereka akan tetap kembali. Mayoritas dari WTS pun tidak terlalu merespon baik dan cenderung acuh terhadap pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam penanganan prostitusi yaitu :

1. Pastisipasi masyarakat sekitar Danau Tempe terhadap masalah prostitusi di Jalan Danau Tempe sangatlah kurang, sebaliknya masyarakat disekitar sana cenderung melindungi aktivitas prostitusi. Itu berdasarkan dari pengakuan berbagai pedagang, seorang kreditor germo/mucikari dan pak Gung Aji Murjana,selaku apparat pemerintah yang turun untuk membina, yang ditanyai soal keberadaan prostitusi di daerah Jalan Danau Tempe tersebut. Mereka menyatakan bahwa banyak pedagang mendapatkan penghasilan kebanyakan dari pendatang yang mencari prostitusi di jalan tersebut, jika prostitusi itu di basmi dari Jalan Danau Tempe maka mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Prostitusi saja sangat dilindungi, apalagi mengharapkan partisipasi masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab kendala Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menangani prostitusi. Masyarakat di sekitar daerah tersebut enggan untuk menghilangkan praktek prostitusi tersebut.

2. WTS cenderung tidak mempunyai respon yang baik terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar,

baik itu pembinaan mental, maupun pembinaan keterampilan. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan prostitusi merupakan pekerjaan yang relatif lebih mudah dan lebih berpenghasilan dibanding jenis pekerjaan lain yang tersedia untuk mereka. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan dari semua narasumber yang dimintai keterangan mengenai respon WTS terhadap pembinaan tersebut. Selain itu mayoritas dari WTS merupakan perempuan yang tidak terdidik sehingga pilihan pekerjaan untuk WTS sangatlah terbatas. Seperti yang disebutkan sebelumnya pendidikan terbatas menyebabkan mereka memilih pekerjaan prostitusi yang mudah dan pendidikan terbatas menyebabkan mereka tidak responsif terhadap pembinaan yang diberikan. Kurangnya respon yang baik dari WTS menyebabkan Dinas Sosial Kota Denpasar kesulitan untuk membina para WTS. Seperti yang penulis sebutkan tadi, selain kinerja yang baik dari Dinas Sosial Kota Denpasar, diperlukan respon yang baik juga dari para WTS, jika WTS tidak mempunyai respon yang baik

3. Menurut pengakuan dari salah satu germo yang beroperasi di Jalan Danau Tempe, mereka membayar sejumlah uang kepada oknumoknum dari instansi pemerintah tertentu untuk mendapatkan, istilahnya, '*Backing'* dari oknum tersebut. Dengan membayar kepada oknum-oknum tersebut, oknum tersebut akan menutup mata terhadap praktek prostitusi tersebut dan jika ada razia tiba-tiba dari pemerintah pusat maka oknum-oknum tersebut akan memperingatkangermo/mucikari tentang razia yang akan datang. Perlu dicatat bahwa mayoritas dari oknum-oknum ini adalah orang-orang yang berjabatan tinggi di dalam instansinya, sehingga dengan *backing* yang dimiliki oleh pelaku aktivitas prostitusi, tindakan yang lebih lanjut untuk menangani prostitusi akan lebih sulit untuk dilakukan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penanganan prostitusi, maka peneliti akan memberi dua saran sebagai berikut :

1. Berhentikan pembinaan pada WTS dan mulai pembinaan pada masyarakat di daerah sekitar di sekitar Danau Tempe, terutama pada anak-anak yang masih di usia masa pubertas karena mereka yang paling labil dan banyak kasus anak di bawah umur yang menggunakan jasa prostitusi. Solusi yang paling tepat untuk menghilangkan prostitusi adalah menghilangkan sumber pendapatannya, yaitu masyarakat. Pembinaan yang dilakukan harus cara menakut-nakuti anak-anak di daerah tersebut dengan penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari hubungan seks yang tidak terkontrol. Jangan dibina hanya dengan ceramah atau

kata-kata, namun dengan binaan visual seperti contohnya menunjukan gambar mengerikan dari penyakit penyakit seksual menular atau mendatangkan korban dari penyakit tersebut. Anak di bawah umur umumnya masih dapat mudah terpengaruhi sehingga pembinaan pada anak-anak akan menjamin generasi kedepan yang lebih sadar akan bahaya dari penyakit seksual yang menular. Dengan tidak adanya 'pelanggan' untuk dilayani maka para WTS akan berhenti bekerja dan masalah prostitusi akan teredam

2. Solusi yang kedua adalah melegalkan prostitusi. Dengan melegalkan praktek prostitusi maka WTS akan dianggap sebagai profesi atau pekerjaan sehingga dapat di pajak oleh pemerintah sehingga memberikan pemasukan tambahan untuk pemerintah Provinsi Bali. Selain itu dengan prostitusi legal maka setiap pekerja prostitusi harus mempunyai surat izin untuk beroperasi agar pekerja prostitusi lebih mudah untuk di kontrol. Dengan legalnya prostitusi, kontrol terhadap prostitusi yang mulanya di pegang oleh mucikari/germo berpindah ke tangan pemerintah yang dapat memantau aktifitas prostitusi ini lebih seksama. Melalui kontrol langsung, pemerintah dapat menekan penyebaran HIV/AIDS, mengontrol siapa saja yang dapat menjadi PSK melalui surat izin, menekan eksploitasi anak di bawah umur. Mengapa prostitusi sebaiknya di legalkan? Karena prostitusi merupakan sebuah aktifitas yang tidak akan bisa dibasmi karena hal ini sudah menjadi sebuah budaya di hampir seluruh bagian di dunia, bahkan di Arab Saudi juga dengan konsep nikah mut'ah. Jadi, ketimbang menghabiskan dana setiap tahun untuk merehabilitasi WTS yang akan kembali lagi ke pekerjaannya; kenapa tidak dilegalkan saja untuk mengambil pemasukan dari prostitusi yang bisa mendukung pembangunan negara.

6.DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

P.Robbins, Stephen, 1994.Teori *Organisasi Struktur, Desain, danAplikasi,* Arcan: Jakarta

Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1993, *Metode Penelitian survei*, Jakarta. LP3ES.

Tangkilisan, Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*.Jakarta : Grasindo

Haryoto.2008.*Kinerja Organisasi*. Jakarta: Grasindo

Anwar, 2008. *Perilaku dan Budaya Organisasi*.Bandung: PT Refika Aditama.

M Tampubolon, Manahan, 2004. *Manajemen Operasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

A Kinick, 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yayat M Herujito, 2001. *Dasar-dasar manajemen*.Jakarta: Grasindo.

Kartini Kartono, 1997.*Patologi Sosial* Jakarta: CV. Rajawali

Lexy J. Maleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali,2017. *Statistik Kriminal Provinsi Bali,*Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Sugiyono,2017. *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D,*Alfabeta:Jakarta

Sumber Online

TimBaliPos.Com. 2018. **Membongkar Salon Plus-Plus di Singaraja Bali**. Diunduh dari https://www.liputan6.com/regional/read/3737247/membongkarsalon-plus-plus-di-singaraja-bali.

Diakses pada Tanggal 20 Maret 2019.

BaliPost.com.2017. **Keradaan PSK di Denpasar, Sulit Dijaring Karena Ini** http://www.balipost.com/news/2017/12/21/32134/Keradaan-PSK-di Denpasar,Sulit...html. Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2019

PalingSeru.com.2016. **5 KELAS PROSTITUSI DI BALI.** http://palingseru.com/28635/5-kelas-prostitusi-di-bali.

Diakses pada Tanggal 20 Maret 2019

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2018 **Statistik, Jumlah Penduduk, Pelaporan Tindakan Kriminal Dan Perumbuhan Penduduk.** https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/15/37 Diakses pada Tanggal 27 Maret 2019

MateriIPS.2017. **Macam-Macam Penyakit Sosial dalam Masyatakat**

MateriIPS.com/Sosiologi/Macam-Macam Penyakit Sosial dalam Masyatakat

Diakses pada Tanggal 27 Maret 2019

TribunNews. 2017. **Bali Penyumbang Devisa Terbesar di Sektor Parwisata** http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/10/bali-penyumbang-devisaterbesar-di-sektor-pariwisata

Diakses pada Tanggal 27 Maret 2019

BaliPost. 2018 **Bali Diupayakan Tak Tergantung Sektor Pariwisata** http://www.balipost.com/news/2019/01/22/66751/Bali-Diupayakan-Tak-Tergantung-Sektor...html

Diakses Tanggal 27 Maret 2019

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 296 tentang pelarangan kegiatan prostitusi dan Pasal 506 tentang pelarangan pengambilan keuntungan dari kegiatan prostitusi (Germo)

Peraturan Daerah kota Denpasar No 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum